

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS PEMBERDAYAAN UMAT

A. Gambaran Umum Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

“Pemberdayaan” sering digunakan sebagai terjemahan dari kata *empowerment*. *Empowerment* merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, terutama Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu luas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan penelitian kepustakaan, terdapat beberapa definisi pemberdayaan baik dalam arti sempit maupun luas. Nanih Machendrawati memahami pemberdayaan sebagai sebuah proses, upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri dan bersifat lokal. Nanih Machendrawati melihat potensi yang dikembangkan merupakan modal pemberdayaan. Demikian juga dengan Setiana L. melihat pemberdayaan adalah upaya penguatan entitas objek yang ditempatkan sebagai subjek. Masyarakat sebagai pelaku yang dipandang memiliki potensi diri yang bisa dikembangkan. Artinya, dalam pemberdayaan masyarakat hal yang paling diutamakan adalah memposisikan individu sebagai subjek dalam membangun diri dan masyarakatnya. Untuk itu pemberdayaan masyarakat semestinya dilaksanakan dengan mengacu pada

karakteristik sasaran yang diberdayakan sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri khusus, latar belakang, budaya tertentu, ideologi dan paham tertentu serta kepribadian tertentu dan seterusnya.¹

Jika dikaji dari aspek pluralis, maka konsep pemberdayaan didefinisikan: “suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memahami bagaimana memanfaatkan sistem dan sebagainya.”²

Pemahaman konsep pemberdayaan tentu memerlukan pengetahuan tentang pola perubahan struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial, yang secara lebih rinci dapat dijelaskan: pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi atau pengembangan diri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu, dikemukakan oleh Glikman sebagai “*internal control and individually divergent practices, solving problems independently*”. Akan tetapi proses ini tidak

¹ Setiana L., *Tehnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 7.

² Prof. Dr. H.A.Fauzie Nurdin, M.S, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, Panta Rhei Books Offset: 2016, hlm. 25

hanya meliputi pemberdayaan individu saja, melainkan juga mencakup upaya pemberdayaan orang lain, seperti yang dikemukakan oleh Weisglass, “*a process of supporting people to construct new meaning and exercise their freedom to choose*”. Pendapat ini diperkuat oleh Irwin, yang mengemukakan bahwa “*empowering other people means giving them a chance to make their special contribution. Your contribution may be a particular insight, a particular talent, a particular energy, a particular loving way to be with people*”.³

Pemberdayaan dalam perspektif pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan.⁴

2. Pemberdayaan Dalam Lintasan Sejarah

Konsep *empowerment* mulai nampak di sekitar dekade 70-an dan kemudian berkembang terus sepanjang dekade sampai saat ini. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau

³ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranaka (Penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center For Strategic and International Studies, 1996, hlm. 72.

⁴ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Terjemahan: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 285.

zaman renaissance. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada abad ini cenderung tumbuh dan bermuara kepada suatu tatanan yang basis idealnya adalah determinisme keagamaan, sementara basis strukturalnya adalah organisasi gereja serta monarki. Determinisme apapun bentuknya, di dalam perkembangannya akan selalu mengalami kontradiksi internal dan cepat atau lambat akan mengalami keterpecahannya.

Determinisme keagamaan abad pertengahan itu tidak lagi menjawab perkembangan jaman. Maka manusiapun berusaha mencari alternatif-alternatifnya. Abad modern amat diwarnai oleh lahirnya alam pikiran yang ingin menemukan tatanan atau sistem yang bersifat non keagamaan sebagai alternatifnya.

Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai.

Sementara di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan

dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

3. Pembagian Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Intelektual

Pemberdayaan meliputi pemberdayaan pemikiran dari individu-individu yang berada di dalam masyarakat. Pemberdayaan pemikiran atau pemberdayaan intelektual adalah upaya untuk meningkatkan wawasan masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Hal itu merupakan salah satu kunci mendasar dari upaya pemberdayaan. Pencapaian pemberdayaan materi atau penguatan infrastruktur kerap kali lebih mencerminkan instrumen intervensi dalam proses pemberdayaan. Hal substansial dari upaya pemberdayaan adalah meningkatkan dan memperluas wawasan individu-individu dalam masyarakat. Tanpa upaya-upaya tersebut sangat besar kemungkinannya upaya pemberdayaan akan gagal, jika pun berhasil tidak akan bersifat berkelanjutan.

Menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto pemberdayaan adalah proses menjadi yang membutuhkan waktu, tidak bersifat instan. Dalam waktu yang tidak singkat dimungkinkan terjadi upaya perubahan dalam tataran pengetahuan, diskursus atas keadaan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Ada proses pemberdayaan pemikiran dalam waktu panjang yang dibutuhkan. Itulah pemberdayaan intelektual. Pemberdayaan intelektual merupakan salah satu syarat dari pemberdayaan

secara menyeluruh. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengilustrasikan proses pemberdayaan sebagai berikut:



Sumber: Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 2007

Pada tahap penyadaran itulah proses pemberdayaan intelektual sedang dilangsungkan. Aspek teoritis dari pemberdayaan intelektual itu meliputi; perluasan wawasan serta pemahaman atas hak potensi yang dimiliki.

1. Perluasan wawasan adalah upaya pembukaan wacana baru atau ilmu baru yang berada di luar dirinya. Pengetahuan atau pemahaman yang belum dimiliki oleh individu-individu dalam satu masyarakat. Sehingga membuat kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat sulit mengalami perkembangan. Bahkan cenderung mengalami stagnasi karena sempitnya pemahaman. Dengan perluasan wawasan dimungkinkan perubahan pemahaman dengan munculnya upaya-upaya reinterpretasi dan pemahaman baru.
2. Masyarakat pada suatu kondisi membutuhkan penyadaran atas apa yang sebenarnya baik dari apa yang mereka miliki. Masyarakat memiliki laku yang sudah menjadi norma di antara mereka atau sistem sosial yang mereka jalani. Persoalannya adalah mereka kerap kali tidak memiliki

kesadaran atas apa yang dimilikinya sebagai sesuatu yang baik, sehingga pada satu kondisi mereka dengan perlahan meninggalkan satu laku dan sistem sosial yang telah lama dijalani karena adanya nilai-nilai baru. Kenyataan ini biasanya terjadi karena pergantian generasi dalam satu masyarakat. Kemungkinan yang lain mereka merasa mengalami kejumudan dan lebih memilih nilai dan pemikiran baru yang belum tentu lebih baik.

Pemberdayaan intelektual meliputi hal yang berkenaan dengan kesadaran dan pemikiran. Instrumen pemberdayaan intelektual itu medianya adalah lembaga-lembaga pendidikan, komunitas akademik serta media massa dan buku-buku bacaan. Salah satu contoh, Gus Dur dalam awal kiprahnya melakukan pemberdayaan di Indonesia dengan cara melibatkan dirinya dalam pendirian lembaga bernama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). P3M merupakan lembaga non pemerintah (*non government organisation*) yang memiliki kepedulian besar terhadap pemberdayaan masyarakat melalui skema lembaga pendidikan pesantren. Itulah salah satu laku pemberdayaan intelektual yang pernah digagas oleh Gus Dur.

Titik tekan pemberdayaan intelektual adalah pengembangan cara berfikir masyarakat. Upaya perluasan wawasan serta pemahaman atas potensi lokal mereka tentu membutuhkan ruang pembebasan berfikir kreatif. Tujuan dari pemberdayaan intelektual bukan hanya kecerdasan logika, melainkan kecerdasan kreatif. Di lain pihak pemberdayaan intelektual juga dicirikan

dengan skema penguatan diskursus dalam melakukan reinterpretasi atas teks-teks agama misalnya, lalu dielaborasi dengan konteks sosial serta budaya lokal. Dalam upaya reinterpretasi dimaksudkan pencapaian relevansi teks dengan konteks. Dimana ilmu pengetahuan dan nilai-nilai terbaru sebagai keyakinan yang menggerakkan langkah-langkah praksis.

b. Pemberdayaan Budaya

Proses pemberdayaan intelektual berkorelatif dengan pemberdayaan aspek budaya. Pada dasarnya konsep pemberdayaan adalah konsep yang luas dan menyeluruh. Satu aspek pemberdayaan memiliki keterkaitan dengan aspek pemberdayaan lainnya. Misalnya, masyarakat yang berada pada situasi belum beruntung secara ekonomi memerlukan upaya pemberdayaan dengan berbagai skema, baik itu secara wawasan juga aspek kebudayaannya serta aspek ekonominya dipihak lain. Mereka perlu mendapat pemberdayaan untuk dapat meningkatkan harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Artinya, pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan budaya adalah proses peningkatan kualitas kebudayaan suatu masyarakat. Budaya atau kebudayaan bukan peristiwa individual, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan masyarakat serta sistem nilai di dalamnya. Artinya, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu dalam masyarakat, melainkan juga pranata-pranata yang melingkupinya.

Demikian pula pembaruan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya. Dalam pemahaman demikian, konsep pemberdayaan menyangkut perubahan yang menyeluruh dari sistem sosial masyarakat, norma, sikap masyarakat, bukan hanya kemampuan individual. Proses pemberdayaan budaya adalah upaya penguatan karakter secara berkesinambungan dalam laku hidup keseharian masyarakat. Misalnya menyangkut etos kerja dan norma sosial yang berkembang melingkupi kehidupan masyarakat.

Menurut Agus Sachari dalam lingkup transformasi budaya, pemberdayaan dapat dipandang sebagai upaya-upaya masyarakat untuk memberdayakan dan menyesuaikan diri terhadap dinamika budaya yang tengah berlangsung. Sedangkan dalam masyarakat modern, gerakan-gerakan pemberdayaan kerap ditafsirkan sebagai upaya perlawanan, perimbangan, penyetaraan, ataupun pendinamisasian satu kegiatan yang mengalami pemapanan, kurang kreatif, atau mereka yang terpinggirkan.⁵

c. **Pemberdayaan Ekonomi**

Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), warga negara Indonesia dituntut untuk lebih aktif dan pro-aktif dalam pengembangan ekonomi negara. Dalam kaitan tersebut penting pula bagaimana masyarakat yang tidak memiliki kapital, sebagaimana diungkapkan Max dalam materialisme

⁵ Agus Sachari, *Budaya Visual Indonesia*, Surabaya: Erlangga: 2007, hlm. 36.

historisnya, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia sehingga terberdaya. Di sinilah pentingnya pemberdayaan yang bersumber pada penguatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan optimalisasi sumber daya, baik yang bersifat *soft-skill* ataupun *non-skill* dalam hal ini sumber daya alam. Ite, sebagaimana dikutip Agus Purbathin Hadi, mengartikan konsep pemberdayaan yang bersumber pada penguatan kapasitas ialah pemberdayaan (*empowerment*) yang dilakukan oleh tokoh atau organisasi untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi (masyarakat) serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.⁶

Pemberdayaan yang memfokuskan pada penguatan ekonomi atau pengembangan sumber daya ekonomi suatu masyarakat berhubungan langsung terhadap hubungan sosial-kemasyarakatan. Maka dorongan antar berbagai pihak misalnya, diperlukan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditopang oleh pernyataan Agus Purbathin Hadi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan paradigma baru pembangunan, sebagaimana disebutkan Chambers, yang bersifat *people centered* (berpusat pada masyarakat),

⁶ Agus Purbathin Hadi, "*Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan*," Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA): 2009, hlm. 2-3.

participatory (bersifat partisipatif), *empowering* (pemberdayaan), and *sustainable* (berkelanjutan).

Konsep tersebut menurut Agus Purbathin Hadi dari Ginanjar Kartasmita lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity'*.⁷

Menelisik dari pernyataan tersebut ditarik kesimpulan sementara bahwa pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan, salah satunya pada penguatan ekonomi masyarakat ialah upaya berkesinambungan menuju masyarakat sejahtera. Secara umum proses tersebut dilakukan secara bersama-sama antara seluruh *stakeholders* (pemangku kebijakan) dan masyarakat sendiri untuk terperdaya sebagai sebuah masyarakat, mengutip Nurcholis Madjid, masyarakat madani. Bersumber pada penguatan teks dan konteks suatu masyarakat dalam satu wilayah yang khusus atau umum (menyeluruh).

⁷ *Ibid*, hlm.6.

Adanya ide pemberdayaan penguatan ekonomi masyarakat yang bersumber pada program kerja pemerintah atau NGO (*non government organization*) misalnya, untuk individu, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas sejatinya dapat sejalan secara teoritis dan praktis. Di sinilah pemberdayaan umat akan berjalan (*sustainable*) dan berkembang (*enable*) dari titik tolak sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya pula.

Secara teoritik pemberdayaan masyarakat yang bersumber pada penguatan ekonomi sudah ratusan tahun dianalisis dan dikembangkan. Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat telah pula dicarikan sumbu utama persoalan dan pemecahannya sejak revolusi industri, di mana pada saat revolusi industri pertama kali mencuat merebak kesenjangan antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Marx, Friedman, Robert Dahl, Kassam, Sen dan Grown, Paul, dan masih banyak pemikir sosial lain memiliki konsens pada pengembangan ekonomi masyarakat. Teoritisasi yang dikembangkan para pemikir sosial tersebut dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memberikan ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi, mengambil keputusan, dan saling menguatkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan sumber daya ekonomi.

Sumodiningrat, secara singkat, menyebutkan konsep pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kebijakan pemerintah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - (1) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - (2) Penguatan kelembagaan;
 - (3) Penguasaan teknologi; dan
 - (4) Pemberdayaan sumber daya manusia
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:

- (1) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
- (2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*;
- (3) Pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- (4) Penguatan industri kecil;
- (5) Mendorong munculnya wirausaha baru; dan
- (6) Pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- (1) Peningkatan akses bantuan modal usaha;
- (2) Peningkatan akses pengembangan SDM; dan
- (3) Peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.⁸

Mengacu pada pelbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan (ekonomi) umat, sebagaimana disebutkan Mardi Yatmo Hutomo, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan

⁸ Gunawan Sumidiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*; Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 12.

masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁹

B. Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat

Substansi nilai menurut berbagai pakar memiliki arti yang luas. Pada hakikatnya nilai dimanifestasikan ke dalam moralitas kemanusiaan. Hal tersebut menjadi akar dari suatu gerakan atau tujuan hidup seseorang. Nilai merupakan sumber utama seseorang dalam bersikap, bertindak, berperilaku, dan berinteraksi dengan manusia dan lingkungannya.

Nilai sosial adalah sebuah konsep abstrak yang dimiliki manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, dan benar atau salah. Menurut Prof. Notonegoro nilai (sosial) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang meliputi;

1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia.

⁹ Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi," Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas (Badan Perencanaan Nasional), tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, hlm. 3.

3. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia.
4. Nilai religius (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.¹⁰

Sedangkan term pemberdayaan sebagaimana disebutkan di muka ialah upaya untuk membangun daya manusia dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki manusia dan lingkungannya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dalam konteks Islam tidak lebih sama dengan dakwah. Dalam perspektif dakwah, pemberdayaan dilakukan melalui dua hal, yakni dakwah *bi al-lisan* (dengan ucapan, pemikiran, seruan) dan dakwah *bi al-hal* (dengan tindakan dan implementasi pemikiran ke dalam tindakan nyata).

Menurut Kgs. H. M. Daud, bentuk yang pertama lebih menekankan kepada pendekatan lisan, dan yang kedua lebih menekankan kepada pendekatan perbuatan. Dakwah *bil hal* yang telah diterima oleh masyarakat pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya pengembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebudayaan menurut ajaran Islam. Sejalan dengan itu, sasaran dakwah *bil hal* adalah masyarakat dalam arti keseluruhan serta permasalahan yang bersifat sistematis dalam struktur sosial yang Islami. Berdasar itu jelas penyelenggaraan dakwah *bil hal* membutuhkan dukungan metodologi dan

¹⁰ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1980, hlm. 17.

kelembagaan yang sesuai dan signifikan. Dari aspek metodologi dalam dakwah *bil hal* yang dipandang tepat ialah metode pengembangan masyarakat dari dalam yang merupakan cara bagaimana berusaha mengembangkan prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat dalam memenuhi keperluan dan kepentingannya.¹¹

Umat sebagaimana menjadi fokus dalam kajian ini oleh para pakar didefinisikan banyak arti. Ada yang menyebut umat adalah sekumpulan manusia lebih dari 40 orang, ada pula yang menyebutkan segala yang bernafas disebut umat, termasuk hewan dan semacamnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata umat diartikan sebagai:

1. Para penganut atau pengikut suatu agama
2. Makhluk manusia.

Menurut Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* menyebutkan bahwa kata umat diartikan dengan berbagai arti. Kata umat berasal dari kata (*amma-yaummu*), yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata *um* yang berarti "ibu" dan *imam* yang maknanya "pemimpin"; karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Dalam kata "umat" terselip makna-makna yang cukup dalam. Umat mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk menuju pada satu arah,

¹¹ Kgs. H. H. Daud, "Konsep Pengembangan Masyarakat Islam dan Peranan Penyuluh Agama," Palembang: Widyaiswara Madya BDK, 1 Januari 2002, hlm. 2.

harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan pada saat yang sama membutuhkan waktu untuk mencapainya.

Al-Quran surat Yusuf [12]: 45 menggunakan kata umat untuk arti waktu. Sedangkan surat al-Zukhruf [43]: 22 untuk arti jalan, atau gaya dan cara hidup. Ali Syariati dalam bukunya *Al-Ummah wa Al-Imamah* menyebutkan keistimewaan kata ini dibandingkan kata semacam nation atau qabilah (suku). Pakar ini mendefinisikan kata umat –dalam konteks sosiologis-- sebagai "himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama."¹²

Nilai spiritual dalam pemberdayaan umat tidak lebih sama dengan pemberdayaan umat ala Rasulullah dalam menghantarkan umat yang *baladun toyyibun wa robbun ghafur*, yaitu umat yang berada di dalam negara yang baik dan diberkati oleh Allah SWT. Menuju keadaan demikian Rasulullah terlebih dahulu membenahi moral atau akhlak manusia. Elan vital dari upaya tersebut sebagai manifestasi nilai-nilai kenabian di dalam peri kehidupan umat sehari-hari.

Moral kenabian sebagaimana dikatakan Subairi, merupakan moral yang mendukung masyarakat yang berkeadilan, demokratis, berkedaulatan hukum, dan santun pada pluralitas sebagaimana yang telah ada pada masyarakat Islam awal. Pada dasarnya, Islam memang tidak begitu tertarik pada wilayah politik. Kalaupun ada pernyataan Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, haruslah diketahui

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. 19, 1996, hlm. 325-327.

bahwa yang dimaksud politik disini bukanlah politik kekuasaan dalam aras negara, tapi lebih pada politik moral. Maka, tidak heran kalau dalam Islam tidak ada aturan baku tentang pengelolaan negara. Kata negara dalam bahasa arab adalah *al-Daulah* yang tidak pernah ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *baladun* yang memiliki makna bangsa atau komunitas masyarakat. Jadi, Islam sejak semula lebih memperhatikan perjuangan moral melalui lembaga kemasyarakatan atau *civil society* dari pada institusi negara.¹³

Di sinilah ditemukan relevansinya bahwa pemberdayaan umat yang berorientasi pada penguatan masyarakat sipil berbasis nilai-nilai spiritual ialah mengupayakan, mendorong, dan mengoptimalkan segala daya masyarakat menuju masyarakat madani --sebagaimana dicetuskan Nurcholis Majdid. Masyarakat madani adalah masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹³ Subairi, "Islam Dan Pemberdayaan Civil Society; Refleksi Pemikiran Abdurrahman Wahid," artikel untuk Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta: 2011, hlm. 45.